

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMFASILITASI
PENGURUSAN KARTU INDONESIA SEHAT DI DESA TOU
KECAMATAN KOTA BARU KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

OLEH

PAULUS ARYANTO WARA

NIM : 2021110968

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA

UNIVERSITAS FLORES

ENDE

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMFASILITASI
PENGURUSAN KARTU INDONESIA SEHAT DI DESA TOU
KECAMATAN KOTA BARU KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

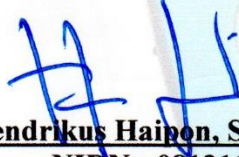
PAULUS ARYANTO WARA

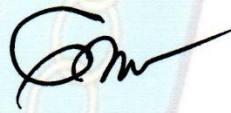
NIM : 2021110968

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801


Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum.
NIDN : 0810048201

Mengetahui :

**Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial
Humaniora
Universitas Flores**

**Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMFASILITASI
PENGURUSAN KARTU INDONESIA SEHAT DI DESA TOU
KECAMATAN KOTA BARU KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

SKRIPSI

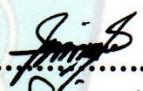
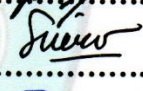
PAULUS ARYANTO WARA

NIM : 2021110968

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN

DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum | (Ketua) | 1.....  |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum. | (Sekertaris) | 2.....  |
| 3. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc. | (Anggota) | 3.....  |
| 4. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum. | (Anggota) | 4.....  |
| 5. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 5.....  |

**Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial
Humaniora
Universitas Flores**


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

**Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PAULUS ARYANTO WARA

Nim : 2021110250

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa peneliti tidak melakukan kegiatan plagiasi dalam bentuk apapun pada skripsi yang berjudul :

“PERAN PEMERINTAH DALAM MEMFASILITASI PENGURUSAN KARTU INDONESIA SEHAT DI DESA TONU KECAMATAN KOTA BARU KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL”

Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 17 Juni 2025

Peneliti



PAULUS ARYANTO WARA

NIM : 2021110968

MOTTO

“Memfasilitasi Kesehatan, Membangun Desa Sehat”

(Paulus Aryanto Wara)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kesederhanaan dan ketulusan hati pada setiap tetesan kasih sepanjang perjalanan menuju kesuksesan, peneliti persembahkan tulisan ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nafas kehidupan, ketekunan dan semangat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Yulius Hengki dan Mama Kristina Lawa yang dengan setia membesarkan, menuntun dan mendukung peneliti dengan penuh kasih sayang serta membiayai perjalanan studi Peneliti hingga selesai.
3. Orang tua wali Bapa Yeremias Firminus Sepni dan Mama Maria Fatima Diro yang telah mendukung peneliti dengan kasih sayang serta memberikan tempat tinggal selama perjalanan studi peneliti hingga selesai .
4. Yang tersayang adiku Fransiska Selfiana Rani Riti dan Yohanes Radon Wara yang telah mendukung peneliti untuk menyelesaikan penelitian skripsi.
5. Kedua Opa dan Oma tercinta Bapak Hubertus Seti dan Mama Maria Mure yang dengan setia membesarkan dan mendukung peneliti dengan penuh kasih sayang.
6. Teman – teman kelas sore yang telah membantu Peneliti baik lewat doa maupun saran, sehingga terselesainya skripsi ini.
7. Alamaterku tercinta Universitas Flores.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan petunjuk-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMFASILITASI PENGURUSAN KARTU INDONESIA SEHAT DI DESA TOUN KECAMATAN KOTA BARU KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL”**.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora pada Universitas Flores. Dalam penyusunan skripsi ini Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh Peneliti baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman Peneliti. Oleh sebab itu Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Proses Penelitian skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil, dengan berbekal ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan berbekal keyakinan, maka tulisan inipun dapat terselesaikan.

Oleh karena itu Peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan motivasi serta saran-saran yang telah diberikan sehingga Peneliti dapat sampai pada tersempurnanya tulisan ini.

Rasa terima kasih yang mendalam Peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt selaku Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores.
2. Bapak Dr. Willybrordus Lanamana, S.E., MMA selaku Rektor Universitas Flores bersama sekretaris Eksekutif dan para Wakil Rektor Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora beserta Wakil Dekan dan jajarannya
4. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/I Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada peneliti selama melakukan studi di Universitas Flores.
7. Bapak Damianus Ambrosius Kabu selaku Kepala Desa Tou, Kecamatan Kota, Baru Kabupaten Ende yang membantu memberikan masukan dan sumber data penelitian dalam penyusunan skripsi ini
8. Bapak Arnoldus Yansen Fowo selaku Kaur Pemerintah Desa Tou, Kecamatan Kota, Baru Kabupaten Ende yang membantu memberikan masukan dan sumber data penelitian dalam penyusunan skripsi ini

9. Bapak Kosmas Baru selaku Sekertaris Desa Tou, Kecamatan Kota, Baru Kabupaten Ende yang membantu memberikan masukan dan sumber data penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Antonius Nikolaus Wiku selaku Operator SIKS-NG Dinas Sosial Kabupaten Ende yang membantu memberikan masukan dan sumber data penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

Ende, 17 Juni 2025

Peneliti



PAULUS ARYANTO WARA

NIM : 2021110968

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRAC	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	7
1.5 Ruang lingkup masalah.....	8
1.6 Metode penelitian.....	8
1.7 Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Peran.....	13
2.2 Pemerintah Desa.....	14
2.3 Kartu Indonesia Sehat	18
BAB III PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMFASILITASI PENGURUSAN KARTU INDONESIA SEHAT DI DESA TOU, KECAMATAN KOTA BARU, KABUPATEN ENDE.....	22
3.1 Melakukan sosialisasi ke masyarakat.....	22
3.2 Mendata masyarakat yang tidak mampu.....	29

3.3	Melakukan pendataan	32
3.4	Mengumpulkan administrasi.....	34
3.5	Melaporkan ke Kecamatan.....	37
BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT PEMERINTAH DESA DALAM MEMFASILITASI PENGURUSAN PENDAFTARAN KARTU INDONESIA SEHAT DI DESA TOU, KECAMATAN KOTA BARU, KABUPATEN ENDE		
.....		43
4.1	Kurangnya sosialisasi.....	43
4.2	Dana yang terbatas	45
4.3	Masyarakat terlalu banyak	47
4.4	Kurang nya pemahaman masyarakat	49
BAB V PENUTUP.....		52
5.1	Kesimpulan	52
5.2	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMFASILITASI PENGURUSAN KARTU INDONESIA SEHAT DI DESA TOW KECAMATAN KOTA BARU KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH PAULUS ARYANTO WARA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam memfasilitasi pelayanan pendaftaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Tow, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Pemerintah Desa, sebagai ujung tombak penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal, memiliki kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat, termasuk hak atas jaminan kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif, melalui wawancara langsung dan studi dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tow menjalankan perannya sebagai fasilitator pelayanan KIS melalui tiga tahapan utama, yaitu sosialisasi kepada masyarakat, pengumpulan dan penginputan data masyarakat kurang mampu ke dalam sistem DTKS, serta pendistribusian kartu kepada penerima manfaat. Peran ini dilaksanakan dalam kerangka kerja sama antara Pemerintah Desa, Dinas Sosial Kabupaten Ende, dan BPJS Kesehatan. Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi rendahnya tanggung jawab aparatur desa dalam memperbaharui data dan keterbatasan kapasitas teknis, sedangkan hambatan eksternal berkaitan dengan lamanya proses verifikasi dan validasi data oleh instansi terkait, yang berdampak pada keterlambatan distribusi KIS kepada masyarakat. Dengan demikian, meskipun Pemerintah Desa Tow telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, efektivitas pelaksanaan program KIS masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta komitmen yang lebih tinggi dari seluruh pemangku kepentingan agar hak atas jaminan kesehatan benar-benar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Kartu Indonesia Sehat, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

ABSTRAC

The Role of VILLAGE Government in Facilitating Indonesia Health Card (KIS) Services in Tou Village, Kota Baru Subdistrict, Ende Regency: A Review Based on Law Number 24 of 2011 on Health Social Security Agency By Paulus Aryanto Wara

This study aims to analyze the role of the Village Government in facilitating the registration services of the Indonesia Health Card (Kartu Indonesia Sehat or KIS) in Tou Village, Kota Baru Subdistrict, Ende Regency, and to identify the factors that hinder its implementation. As the frontline in the delivery of public services at the local level, the Village Government is vested with authority under Law Number 3 of 2024 concerning Villages to ensure the fulfillment of fundamental rights, including the right to health insurance. This research employs an empirical legal study and a socio-juridical approach using qualitative methods, through direct interviews and document analysis with relevant stakeholders. The findings reveal that the Tou Village Government performs its role as a facilitator of KIS services through three main stages: community outreach and socialization, collection and input of data on underprivileged residents into the Integrated Social Welfare Data (DTKS) system, and distribution of the cards to eligible beneficiaries. This role is carried out through a collaborative framework involving the Village Government, the Department of Social Affairs of Ende Regency, and the Health Social Security Agency (BPJS Kesehatan). However, the implementation of this program faces several obstacles, both internal and external. Internal challenges include the low level of accountability among village officials in updating data and limited technical capacity, while external obstacles pertain to the prolonged process of data verification and validation by relevant agencies, resulting in delays in the distribution of KIS cards to the community. Therefore, although the Tou Village Government has carried out its duties in accordance with the prevailing legal provisions, the effectiveness of the KIS program implementation still requires improvement through strengthening institutional capacity at the village level, enhancing inter-agency coordination, and increasing the commitment of all stakeholders to ensure that the right to health insurance is equitably realized by all village residents.

Keywords: Village Government, Indonesia Health Card (KIS), Health Social Security Agency